

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PAKAN DAN BENIH TERHADAP KELOMPOK BUDIDAYA IKAN (POKDAKAN)

Zulkarnain, Meyzi Heriyanto dan Okta Karneli

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

Abstract : Implementation of the Feed and Seed Assistance Program for Fish Farming Groups (Pokdakan). This research is motivated by the increasing needs of fish consumption but the productivity of fisheries is still not in accordance with expectations and production targets even though it has a very potential area for the development of fish farming in Kampar Regency. This study aims to analyze the Implementation of the Feed and Seed Assistance Program for Fish Farming Groups (Pokdakan) in Kampar Regency. Data collection techniques in this study used questionnaires, interviews and observations. Data analysis in this study uses interactive model analysis from Miles and Huberman which includes: data reduction, data presentation, and data verification stages to draw conclusions. The results of the study concluded that the implementation of the feed and seed assistance program for the 2017 fish farming group (Pokdakan) in Kampar Regency, Riau Province had run well and was able to provide benefits in increasing fish farming yields. But the program has not been managed well at the fishermen group level, where not all members of the fishermen who are members of the Pokdakan feel the same benefits from the aid donated by the Kampar District Fisheries Service. While the factors that influence the implementation of the feed and seed aid program in Kampar District, namely the contents of the policy, information, support, and potential distribution all have an influence on the successful implementation of the fisheries assistance program.

Key words: Implementation, Assistance Programs, Fish Farming

Abstrak: Implementasi Program Bantuan Pakan dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan). Penelitian ini dilatarbelakangi semakin tingginya kebutuhan konsumsi ikan namun produktifitas hasil budidaya perikanan yang masih rendah belum sesuai dengan harapan dan target produksi padahal memiliki wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan budidaya ikan di Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Implementasi Program Bantuan Pakan dan Benih Terhadap Kelompok Budidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Kampar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket, wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi: tahap Reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan pakan dan benih terhadap kelompok budidaya ikan (Pokdakan) Tahun 2017 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil budidaya ikan. Akan tetapi program tersebut belum terkelola dengan baik ditingkat kelompok nelayan, dimana anggota nelayan yang tergabung dalam Pokdakan belum semua merasakan manfaat yang sama dari bantuan yang dihibahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan pakan dan benih di Kabupaten Kampar yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi semuanya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan implementasi program bantuan perikanan.

Kata Kunci: Implementasi, Program Bantuan, Budidaya Ikan.

PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang sebagian besar wilayahnya sebanyak 62% merupakan perairan LAUT, Selat dan Teluk, sedangkan 38% lainnya adalah daratan yang didalamnya juga memuat kandungan air tawar dalam

bentuk sungai, danau, rawa dan waduk (Genisa, 1999). Sumberdaya perikanan dapat dibedakan atas perikanan darat dan laut. Perikanan darat merupakan usaha penangkapan dan pemeliharaan ikan dan organisme lainnya di air tawar dan air payau. Sedangkan perikanan laut usahanya meliputi

penangkapan dan pemeliharaan ikan laut serta organisme lainnya di perairan pantai serta perairan lepas pantai.

Provinsi Riau mencakup wilayah daratan bagian timur Sumatera dan wilayah Kepulauan yang membentang sepanjang Selat Malaka sampai Selat Sunda. Luas wilayah meliputi kurang lebih 111.823,60 km² yang terdiri dari 86.411,9 Km². (80,09%) daratan 21.478,86 Km² (19,91%) perairan. Panjang garis pantai 3.201,95 Km² (<http://diskanlur Riau.com>-Dinas Perikanan dan Kelautan Riau, 2007).

Purwanto (2000), menyatakan bahwa pendapatan dari hasil perikanan lebih ditentukan oleh hasil perikanan tersebut. Apabila harga hasil perikanan tersebut meningkat, maka dengan sendirinya pendapatan rumah tangga perikanan juga meningkat. Untuk itu perlu adanya peningkatan produksi perikanan yaitu dengan menerapkan teknologi perikanan yang baik, modal, bantuan dana hibah, bantuan pakan dan benih serta pemasaran yang baik pula.

Area budidaya ikan yang terdapat di kabupaten kampar meliputi darat dan sungai. Budidaya darat merupakan tempat yang sangat diminati oleh sebagian masyarakat kampar, terutama untuk pembuatan kolam budidaya ikan, baik yang sumber air nya bagus atau pun yang menggunakan tadah hujan.

Budidaya ikan dalam kolam yang dilakukan oleh pelaku usaha, saat ini sudah sangat maju dan berkembang, baik dari segi teknis budidaya, teknis pemberian pakan serta teknis lainnya yang berkaitan dengan pembesaran ikan yang terdapat dalam kolam. Kolam merupakan media budidaya ikan yang sangat efektif dan mudah dalam pengelolaannya.

Potensi usaha budidaya perikanan di kabupaten kampar cukup luas dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Untuk budidaya kolam ikan terdapat 6.111,3 Ha, dari luas tersebut telah diusahakan dan dikelola oleh masing-masing pembudidaya ikan seluas 863,48 Ha atau 14,13% dari total luasan, dengan hasil produksi 23.939,06 ton dengan tingkatan

produktifitas baru mencapai 27,72 ton/ha/tahun.

Untuk budidaya ikan dalam keramba dan jaring apung tersedia area 410 Ha antara lain mencakup : waduk PLTA Koto Panjang 275 Ha, sungai seluas 125 Ha serta danau seluas 10 Ha. Dari jumlah tersebut, dimanfaatkan untuk budidaya keramba sebesar 39 Ha (9,52 %), atau sebanyak 7.799 unit keramba dengan produksi 3,57 ton/unit/tahun. Disamping budidaya keramba jaring apung, sungai kampar juga merupakan tempat budidaya ikan yang sangat paforit bagi masyarakat kampar, terutama di kecamatan kampar desa ranah (Tarmizi, 2015).

Sungai Kampar merupakan salah satu sungai yang terbesar di provinsi Riau dengan panjang 413,5 km dan lebar 143 meter serta kedalaman 7,7 meter (BPS Provinsi Riau, 2003). Sungai Kampar melewati 11 kecamatan, dimana hulunya terdapat di Kecamatan XIII Koto Kampar dan bermuara di Kuala Kampar. Dari 11 wilayah kecamatan tersebut, Kecamatan yang termasuk Daerah Aliran Sungai Kampar yaitu XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kampar, dan Kecamatan Siak Hulu.

Sumberdaya perairan Sungai Kampar merupakan sumberdaya yang bersifat Common Property (milik bersama) dan semua orang dapat memanfaatkan perairan tersebut kapan saja. Peranan sungai kampar dari hulu ke hilir, peranannya sangat besar sekali baik sebagai sarana transportasi dan juga sebagai penunjang kehidupan sehari-hari bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai kampar tersebut. Peranan sungai kampar yang sangat besar mendukung semua aktifitas manusia yang berada di sekitarnya.

Saat ini pemamfaatan Sungai Kampar untuk perkembangan usaha budidaya ikan dalam keramba khususnya di Desa Ranah Kecamatan Kampar perkembangannya sangat padat. Jumlah pembudidaya ikan dalam keramba di Desa Ranah saat ini diperkirakan lebih dari 1.225 unit yang dimiliki oleh 475 Kepala Keluarga (KK), dimana 1 unit keramba rata-rata produksinya

800 kg – 1000 kg dengan ukuran keramba 4m x 6m x 1,5m dan 4m x 8m x 1,5m. Jenis pakan yang diberikan terdiri dari pakan komersial (pakan pabrik) dan pakan buatan (pakan alternatif) masyarakat. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan oleh masyarakat diantaranya ikan Nila, Bawal, Baung dan Jelawat (Kantor Desa Ranah, 2011). Pada saat ini umumnya pelaku usaha budidaya ikan dalam keramba di Desa Ranah jenis ikan yang dipelihara yaitu ikan Jelawat. Sebagai ilustrasi, jika populasi ikan perkeramba 1.000 ekor dengan jumlah keramba lebih kurang 1.225 unit dengan berat ikan rata-rata perekorannya 0,2 kg maka akan menghasilkan berat ikan lebih kurang 245 ton ikan, perbandingan pakan ikan yang diberikan 3%, maka jumlah pakan perharinya yang diberikan lebih kurang 7,35 ton/hari.

Keramba apung atau media budidaya terapung adalah berupa kantong jaring yang letaknya terapung di permukaan air, dengan disangga oleh pengapung yaitu berupa drum. Agar dapat berfungsi, wadah ini dikaitkan pada sebuah rakit berbentuk bujur sangkar atau empat persegi panjang. Keramba ini biasanya digunakan di perairan danau atau waduk.

Sejalan dengan berjalanya usaha budidaya ikan, usaha pembenihan ikut mendorong dalam rangka memenuhi kebutuhan benih di kabupaten kampar. Hal ini terlihat dari RPJM dinas perikanan kabupaten kampar sebesar 172 juta ekor, yang terealisasi 159 juta ekor atau mencapai 92,46% dari target yang direncanakan.

Berikut ini berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dalam budidaya perikanan di Kabupaten Kampar, antara lain sebagai berikut:

1. Kendala kondisi alam disebabkan banjir yang sering terjadi akibat luapan PLTA Koto Panjang.
2. Produktifitas hasil budidaya perikanan yang masih rendah, belum sesuai dengan target produksi.
3. Harga benih dan pakan yang relatif mahal sehingga membebani biaya produksi

4. Belum meratanya bantuan perikanan kepada kelompok budidaya ikan.
5. Masih minimnya teknologi pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil budidaya perikanan..

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penggunaan metode dan pendekatan ini sesuai dengan tujuan pokok penelitian, yaitu untuk mengkaji, mendeskripsikan, menganalisis data, dan informasi sesuai kebutuhannya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong (2007:6).

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Tambahan informasi diperoleh dari informan lainnya yang ditentukan dengan teknik snow ball sampling.

Penelusuran informan akan berakhir jika sudah tidak diperoleh tambahan informasi atau dihadapkan pada kendala dana dan waktu Berikut ini merupakan informan-informan yang diwawancarai menjadi sumber data dalam penelitian yang akan dilaksanakan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

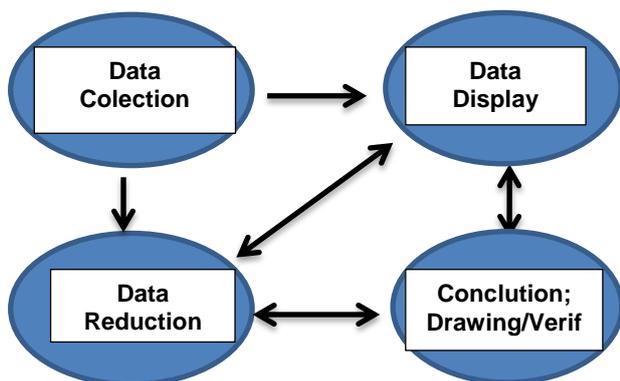
1. Kepala Dinas Perikanan
2. Kepala Bidang
3. Penyuluh
4. Anggota Pokdakan

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Penelitian ini adalah penelitian

deskriptif, lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model interaktif dalam analisis data model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:246)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model interaktif dalam analisis data model Miles dan Huberman, digambarkan dalam Gambar berikut ini:



Gambar: Model Miles dan Huberman

HASIL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III Tahun 2015 – 2019, yang telah ditetapkan melalui Perpres No. 2 tahun 2015, telah mengamanatkan untuk terus melakukan pembangunan berbagai bidang secara berkelanjutan. Perikanan Budidaya, dengan potensi dan keunggulan karakteristik yang ada, diyakini mampu memberi kontribusi pada 9 agenda pembangunan nasional pemerintah (NAWACITA), diantaranya mewujudkan kemandirian ekonomi (termasuk pembudidaya ikan), serta memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi budidaya yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Penjabaran pelaksanaan pembangunan perikanan budidaya, lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA) Perikanan Budidaya 2015 – 2019, yang disesuaikan dengan perubahan

kondisi eksternal dan internal perikanan budidaya guna menjawab tantangan global.

Meskipun Kabupaten Kampar tidak mempunyai laut, bukan berarti Kabupaten Kampar tidak mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam sektor perikanan. Pengembangan perikanan di Kabupaten Kampar di bedakan menjadi dua, yaitu perikanan tangkap (nelayan) dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perairan umum, dalam hal ini sungai, rawa dan danau. Sedangkan perikanan budidaya terdiri dari budidaya kolam dan keramba, dimana jenis perikanan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kampar.

Perairan secara umum (Danau, Sungai dan rawa) yang terdapat di Kabupaten Kampar mempunyai potensi yang dapat dikembangkan terutama untuk usaha perikanan. Dilihat dari luasan Perairan Umum Daratan (PUD) yang terdapat di Kabupaten Kampar selain untuk daerah penangkapan juga berpotensi kembangkan sebagai areal budidaya, lubuk larangan, perikanan tangkap dan wisata air terutama waduk PLTA Koto Panjang, Sungai Kampar, Sungai Tapung, perairan rawa serta danau-danau (Oxbow Lake) yang sangat banyak dan luas sehingga dibutuhkan pengawasan yang maksimal dalam menjaga kelestariannya.

Tabel 5.1: Potensi Sumberdaya Perairan Kampar

No	POTENSI PERAIRAN	PANJANG / LUAS
1	Waduk PLTA Koto Panjang	12.000 Ha
2	Sungai Kampar Kanan	276.687,34 Mtr
3	Sungai Kampar Kiri	121.763,07 Mtr
4	Sungai Kampar Kiri A	53.834,59 Mtr
5	Sungai Kampar Kiri B	194.641,53 Mtr
6	Sungai Tapung Kanan	91.783,51 Mtr
7	Sungai Tapung Kiri	124.656,77 Mtr
8	Danau (Oxbow Lake)	1.286,3 Ha

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018

Secara umum, untuk sektor perikanan tahun 2017 di Kabupaten Kampar telah menyumbangkan produk perikanan sebesar 3.773,05 ton Ikan yang umumnya ditangkap oleh nelayan adalah jenis ikan: Ikan Baung, Ikan Motan, Ikan Pantau, Ikan Tapah, Ikan Selais dan Ikan Tawes. Dalam budidaya kolam dan keramba / jaring apung, ikan yang

dibudidayakan 33,211.56 ton dari kolam dan 24,936.49 ton dari karamba di Kabupaten Kampar adalah dari jenis Ikan Mas, ikan Nila, ikan Gurami, Ikan Lele, Ikan Bawal, Ikan Jelawat, dan Ikan Baung.

Tabel 5.2 Data Produksi Perikanan Kampar

No	Tahun	Tangkap	Kolam	Keramba
1	2017	3,773.05	33,211.56	24,936.49
2	2016	4,438.88	31,038.84	25,975.51
3	2015	2,505.27	29,683.77	27,813.53
4	2014	2,947.38	23,999.06	28,038.13
5	2013	2,861.54	23,241.81	27,064.07

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018

Pada tahun 2017 dari potensi budidaya kolam yang tersedia yaitu 6.113 Ha, telah dimanfaatkan sebesar 863 Ha atau 14,13 % dengan produksi sebesar 33.211,56 Ton. Untuk budidaya keramba / jaring apung, Kabupaten Kampar memiliki potensi sebesar 410 Ha atau 82.000 unit dengan pemanfaatan sebesar 7.519 unit atau 48,13 Ha dengan produksi sebesar 24.936,49 Ton.

Untuk memenuhi kebutuhan Benih ikan untuk budidaya kolam maupun keramba / jaring apung, para petani mendapatkan benih ikan bukan hanya dari luar Kabupaten Kampar, tetapi Unit Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada di Kabupaten Kampar telah mampu berkontribusi untuk pengadaan Benih ikan. Pada tahun 2017, UPR yang ada di Kabupaten Kampar telah dapat menghasilkan Benih ikan sebanyak 216.004.582 ekor benih. Benih yang dihasilkan terdiri dari berbagai jenis ikan yaitu ikan mas, ikan patin, nila merah / hitam, baung, lele dan gurami.

Tabel 5 . 4 : Jumlah Produksi Benih

No	Jenis	2015	2016	2017
1	Mas	2,128,110	3,280,300	3,490,417
2	Patin	26,425,130	28,869,455	36,913,023
3	Nila Merah	452,864		39,541
4	Nila Hitam	7,221,450	7,827,800	8,830,160
5	Baung	1,325,220	1,566,300	1,859,112
6	Lele	137,666,475	146,298,163	164,361,641
7	Gurami	382,250	403,656	510,688
	Total	175,601,499	188,245,674	216,004,582

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Kampar 2018

PEMBAHASAN

Strategi dan arah kebijakan

Strategi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya organisasi, yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran dan pelayanan masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas penyusunan rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
3. Meningkatkan disiplin dan kualitas sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten.
4. Meningkatkan produktifitas usaha dengan pemanfaatan potensi lahan secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
5. Meningkatkan kelestarian sumberdaya perikanan melalui pengelolaan dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan SDM Perikanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
7. Meningkatkan produksi, nilai jual dan memperluas jaringan pemasaran produk olahan hasil perikanan.

Sementara itu, kebijakan merupakan pedoman yang harus diikuti dalam melaksanakan kegiatan. Penetapan kebijakan ini sejalan dengan sasaran dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Adapun kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
2. Meningkatkan profesionalisme pelayanan masyarakat dengan didukung sarana-prasarana yang memadai.

3. Mengembangkan sistem pelaporan keuangan dan capaian kinerja.
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui pembinaan, pengembangan, pelayanan administrasi kepegawaian, dan peningkatan disiplin pegawai.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
7. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan kawasan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.
8. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani ikan baik teknis maupun manajerial sehingga dapat meningkatkan produktifitas usahanya.
9. Meningkatkan produksi, konsumsi, distribusi dan akses pasar produk olahan hasil perikanan.

Implementasi kebijakan dan Program Bantuan Perikanan

Berikut ini akan dibahas mengenai implementasi kebijakan dan bantuan perikanan di Kabupaten Kampar, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Van Mater dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan. Menurut Dunn (dalam Muhajir, 2004:29) ada 3 pendekatan analisis kebijakan.

Tabe:. Tiga Pendekatan Analisis

Pendekatan	Pertanyaan Pokok	Tipe Informasi
Empiris	Apakah sesuatu itu ada? (fakta-fakta)	Penandaan
Evaluatif	Berapa nilai sesuatu? (nilai-nilai)	Evaluatif
Normatif	Apa yang harus dilakukan? (tindakan)	Anjuran

Sumber: Dunn (dalam Muhajir, 2004:31)

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, terdapat lima tipe informasi yang relevan dengan kebijakan yang dilaksanakan di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, yaitu:

- a. Masalah kebijakan (policy problema) merupakan nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.
- b. Alternatif kebijakan dilakukan merupakan arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan pada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan.
- c. Tindakan kebijakan (policy action) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, dilakukan untuk mencapai tujuan yang bernilai.
- d. Hasil kebijakan (policy outcomes) merupakan akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang dilaksanakan. Hasil dari setiap kebijakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan: juga tidak semua hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.
- e. Hasil guna kebijakan untuk melihat tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai.

Sejalan dengan itu Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran biokrasi, melainkan lebih dari itu yang menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Maka dari itu implementasi kebijakan merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses kebijakan.

Implementasi kebijakan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme operasional ke dalam prosedur pelaksanaan kebijakan, namun terkait juga dengan

bagaimana suatu kebijakan itu diperoleh stakeholders dan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Oleh sebab itu proses implementasi kebijakan perlu dipahami beberapa konsep proses implementasi kebijakan. Selanjutnya proses implementasi kebijakan menurut Linebery (1978) yang dikutip Putra (2001:81) menyatakan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut :

- a. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksanaan
 - b. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksanaan (standard operating procedures).
 - c. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan diantara badan pelaksanaan
 - d. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.
2. Program Bantuan Perikanan Kepada masyarakat

Pemanfaatan sumberdaya perikanan memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat, terutama masyarakat di daerah sungai atau masyarakat secara terintegrasi sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan sektor perikanan semata tetapi juga harus diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi lainnya, kelestarian lingkungan, peranan wanita, dan penguatan kelembagaan masyarakat (Susilo dalam Kusnadi, 2004 : 59).

Dalam program pengembangan budidaya perikanan Kabupaten Kampar antara lain: (1). Mengembangkan serta memberdayakan masyarakat nelayan di wilayah sungai. (2). Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya sungai. (3). Meningkatkan efisiensi dan produktifitas sumberdaya melalui keterpaduan pengelolaan antar berbagai pemanfaatan secara adil, berimbang dan berkelanjutan dalam meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan

masyarakat dengan sasaran program meningkatnya pendapatan masyarakat

Maka disimpulkan program bantuan pakan dan Benih ikan untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan merupakan cara lain dalam pemanfaatan potensi perikanan baik dalam memanfaatkan sumberdaya perikanan mulai dari budidaya ikan, pengolahan sampai dengan pemasaran dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan dengan mengacu pada pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat (Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2012 – 2016).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dan penghambat program bantuan Benih dan pakan ikan di Kabupaten Kampar meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Isi Kebijakan

Isi kebijakan yang dilaksanakan di kabupaten Kampar berkaitan dengan implementasi program bantuan pakan dan Benih ikan antara lain sebagai berikut:

a. Samarnya Isi Kebijakan

Mengenai kejelasan isi kebijakan tentang bantuan perikanan di Kabupaten Kampar diketahui bahwa, content program bantuan perikanan sudah sangat jelas dan terperinci, termasuk menyangkut teknik pelaksanaan program tersebut. Kejelasan program tersebut tentu saja akan terlihat pada pelaksanaan program ditingkat bawah, yaitu bagaimana petugas atau implementor program mampu menterjemahkan program dan melaksanakannya dengan baik. Program tersebut sudah dipahami dan diinterpretasikan dengan baik oleh petugas atau implementor ditingkat bawah. UPT Kampar yang terlibat langsung dalam memberikan penyuluhan kepada kelompok Pokdakan tentu saja memiliki peran penting untuk dapat melaksanakan dan sekaligus memantau bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan secara maksimal untuk meningkatkan hasil produksi ikan.

b. Kurangnya Ketetapan Internal dan Eksternal

Program bantuan sarana dan prasarana budidaya perikanan sudah disusun dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi dinas perikanan Kabupaten Kampar, dimana dalam merumuskan isi kebijakan termasuk bentuk bantuan yang akan diberikan sudah terlebih dahulu memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Pokdakan.

Hal ini sekaligus menegaskan bahwa program ini disusun secara bottom up, dimana pemerintah Kabupaten Kampar memberikan bantuan pakan dan Benih ikan dengan terlebih dahulu menerima masukan dari Pokdakan tradisional. Informasi yang diperoleh mempertegas bahwa program bantuan perikanan dinas perikanan Kabupaten Kampar telah disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal, sehingga program tersebut mendapat dukungan tidak saja dari unsur pemerintah tetapi juga para masyarakat.

c. Dukungan Sumber Daya

Diperoleh keterangan bahwa program bantuan perikanan yang dilaksanakan oleh dinas perikanan Kabupaten Kampar masih belum dilengkapi dengan jumlah SDM yang memadai, terutama dari petugas penyuluh. Jumlah petugas penyuluh lapangan yang bertugas di Kabupaten Kampar masih belum proporsional untuk mengawal atau memonitoring dan memberikan penyuluhan kepada Pokdakan dalam mengelola bantuan yang diberikan.

Meskipun program bantuan perikanan yang diberikan secara langsung kepada anggota Pokdakan tidak dikelola oleh petugas penyuluh lapangan, tetapi langsung di kelola oleh Pokdakan, tetapi pembinaan penting dilaksanakan. Keterbatasan jumlah petugas tersebut mengakibatkan pembinaan kurang berjalan dengan maksimal, sementara kelompok Pokdakan yang sebagian sumber daya manusianya masih rendah sangat membutuhkan pembinaan dari petugas.

Dampak minimnya pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pendamping dari dinas perikanan Kabupaten Kampar telah berdampak terhadap Pokdakan

yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana produksi ikan. Pokdakan di Kabupaten Kampar menilai bahwa mereka tidak mendapatkan banyak penyuluhan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak akan ada artinya apabila kemampuan SDM Pokdakan tidak ditingkatkan.

2. Informasi

Informasi dalam implementasi program yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

a. Implementor mempunyai cukup informasi

Diperoleh keterangan bahwa dalam mengimplementasikan program bantuan perikanan, implementor sudah memiliki informasi yang cukup. Hal ini tidak lepas dari adanya pengaturan yang baik antara antar pihak yang terlibat serta memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Pokdakan sebagai target group kebijakan. Kerjasama yang baik ini merupakan sumber informasi bagi dinas perikanan untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan apa yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Dipihak implementor program dalam hal ini dinas perikanan terlihat memang tidak ada permasalahan menyangkut ketersediaan sumber informasi dalam melaksanakan program bantuan perikanan. Akan tetapi bagi Pokdakan, sumber informasi terlihat masih sangat minim untuk melaksanakan program bantuan perikanan, khususnya untuk mengelola bantuan sarana prasarana dan teknik budidaya untuk meningkatkan produktifitas budidaya ikan.

Keterbatasan sumber informasi yang dimiliki oleh kelompok Pokdakan di Kabupaten Kampar, merupakan kendala dalam program bantuan perikanan yang dilaksanakan oleh dinas perikanan Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan kelompok Pokdakan kurang mendapatkan pendampingan dari petugas tentang bagaimana pengelolaan bantuan, dan hal-hal penting lainnya yang berhubungan dengan teknik pengelolaan bantuan.

b. Komunikasi Dua Arah

Dalam program bantuan perikanan diperlukan komunikasi dua arah yaitu antara dinas perikanan dengan kelompok Pokdakan penerima bantuan. Komunikasi dua arah ini memungkinkan program dapat berjalan dengan baik, karena informasi tidak saja berasal dari pihak pemerintah tetapi juga diberikan oleh Pokdakan.

Komunikasi dua arah ini sangat penting, mengingat dinas perikanan sebagai implementor program ini menginginkan agar program dapat berjalan sebagaimana tujuan yang telah diinginkan, namun demikian mereka juga memerlukan informasi dari bawah yaitu dari kelompok Pokdakan menyangkut kebutuhan dan permasalahan yang dialami sehingga apa yang menjadi keinginan implementor dan kelompok sasaran memiliki korelasi dan pada akhirnya akan memudahkan dalam pelaksanaan program.

Akan tetapi setelah bantuan diberikan, komunikasi dua arah tersebut terlihat kurang dijalankan, sehingga Pokdakan dengan prakarsanya sendiri mengartikan penggunaan bantuan tersebut, tidak mengherankan apabila masih ada kelompok yang tidak mengelola bantuan dengan baik sehingga bantuan yang diberikan tidak dirasakan oleh semua anggota kelompoknya.

3. Dukungan

Program bantuan perikanan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Kampar untuk meningkatkan produksi hasil sungai dan meningkatkan kesejahteraan Pokdakan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama yang berasal dari unsur pemerintah. Sebagai implementor program, pemerintah perlu memberikan dukungan baik materil maupun non materil terhadap jalannya program, termasuk pada saat program sudah disampaikan kepada kelompok sasaran yaitu Pokdakan. Wawancara dengan Bapak Dedi Iswandi Ketua Kelompok Pokdakan Tuah Sepakat yang menyatakan bahwa:

“Program-program pemerintah (Hibah) bisa berjalan dengan baik serta memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat penerima program

apabila ada kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat anggota Pokdakan, karena jika masyarakat tidak bisa menerima program-program pemerintah maka akan sulit suatu masyarakat untuk berkembang, program budidaya ikan air tawar ini sebenarnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara ekonomi, program ini jika dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dan masyarakat pembudidaya akan memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat”.
(Dedi Iswandi, 27 September 2019)

4. Pembagian Potensi

Proses implementasi program bantuan perikanan sudah diatur kewenangan masing-masing pihak yang terlibat. Sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan kewenangan dengan baik. Tidak terdapat permasalahan dalam pembagian kewenangan kepada implementor program. Selain bentuk program yang sifatnya pemberian bantuan secara hibah dan tidak melibatkan banyak pihak, maka dalam hal ini di pihak pemerintah petugas peyuluh dilapangan memiliki peran penting dengan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan pendampingan dan monitoring agar program tersebut berjalan baik.

Diperoleh keterangan bahwa belum adanya pembagian potensi dalam arti pembagian kewenangan yang jelas tentang penggunaan bantuan oleh Pokdakan. Ketidaktepatan ini yang menyebabkan pengelolaan bantuan tidak terkoordinasi dengan baik, dan mengakibatkan tidak semua kelompok Pokdakan mendapatkan manfaat yang sama dari bantuan yang diberikan.

Hal ini juga menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam program bantuan perikanan, dimana pada saat diimplementasikan program tersebut belum dipersiapkan secara matang khususnya menyangkut hal-hal teknis tentang pengelolaan bantuan di tingkat Pokdakan.

Apalagi selama ini kelompok Pokdakan yang terbentuk hanya ditujukan untuk memenuhi persyaratan agar mendapatkan bantuan, tetapi tidak dibentuk sebagai sebuah lembaga yang dapat mengakomodir seluruh kepentingan anggota kelompok.

SIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi program bantuan pakan dan benih terhadap kelompok budidaya ikan (Pokdakan) Tahun 2017 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau telah berjalan dengan baik dan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan hasil budidaya ikan. Akan tetapi program tersebut belum terkelola dengan baik ditingkat kelompok nelayan, dimana anggota nelayan yang tergabung dalam Pokdakan belum semua merasakan manfaat yang sama dari bantuan yang dihibahkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Analisis terhadap faktor yang mempengaruhi implementasi program bantuan pakan dan benih di Kabupaten Kampar yaitu isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi semuanya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan implementasi program bantuan perikanan..

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik, 2006. Kampar Dalam Angka. Pekanbaru, 45 Hal (Tidak diterbitkan)
- Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2015. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Bangkinang 144 Halaman.
- Dunn, William N. 2003. Disunting Oleh Muhadjir Darwin, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT.Hanindita Graha Widia.
- Genisa AS. 1999. Pengenalan jenis-jenis ikan laut ekonomis penting di Indonesia. Oseana 24(1):17-38
- Kusnadi. 2003. Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial. Bandung: Humaniora Utama Press

- Moleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, 2000. Ekonometrika Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Jakarta Press. 412 hal.
- Putra, Fadillah. 2001. Paradigma Kritis Dalam Studi kebijakan Publik. Surabaya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: AFABETA, CV.
- Tarmizi, 2015. Dampak Aktivitas Keramba Apung Terhadap Kualitas Perairan Sungai Kampar Di Desa Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. 109 Hal. (Tidak diterbitkan).
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan dari Formulasike Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua, Malang: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2012. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.